

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Thailand yang dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara memiliki tanah-tanah yang subur dan iklim tropis sangat cocok untuk mengembangkan pertanian. Kondisi iklim yang lembab juga membuat pepohonan banyak tumbuh di Thailand. Adapun hasil utama dari Thailand diantaranya beras dan jagung, kayu gelondongan, tapioka, buah-buahan dan karet, hasil sumber daya alam ini yang menjadi bahan untuk diekspor ke luar negeri dan menjadi pemasukan bagi Thailand. Hasil dari sumber daya alam tersebut membuat Thailand menjadi negara yang memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomiannya. Akan tetapi, sama seperti halnya dengan negara-negara tetangganya, perekonomian Thailand pada saat itu masih mengalami kemerosotan dan kemacetan akibat pengaruh dari resesi ekonomi dunia. Pada tahun 1979, Thailand masih berusaha untuk keluar dari permasalahan ekonomi tersebut. Defisit neraca perdagangannya meningkat dari 28.540 juta baht pada tahun 1978 menjadi 47.053 juta baht pada tahun 1979. Angka defisit itu meningkat hingga 57.985 juta baht pada tahun 1980 (Mangandaralam, 1995, hlm. 44). Krisis minyak yang kemudian diikuti resesi ekonomi dunia, mengakibatkan ekonomi Thailand semakin menurun. Langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang dilakukan tahun 1981 tidak terlalu efektif untuk meningkatkan ekonomi Thailand.

Keadaan sempat membaik tahun 1983 akibat meningkatnya sektor swasta seperti produksi semen, bijih baja, produksi sepeda motor, bir, dan rokok. Meskipun demikian hingga tahun 1985, permasalahan ekonomi ini masih berlangsung, hal tersebut disebabkan oleh terjadi devaluasi baht serta tingkat pengangguran yang meningkat. Memasuki tahun 1990, Thailand memutuskan untuk meliberalisasi perekonomiannya, modal asing mulai berkembang di Thailand. Tingkat investasi yang tinggi dan pasar saham yang terus meningkat dari tahun ke tahun menghasilkan banyak uang untuk negara Thailand. Investor Barat mulai tertarik menanamkan sahamnya di Thailand, hal ini berlangsung sejak

Annisa Wiyani Putri, 2017
KEBIJAKAN PERDANA MENTERI THAKSIN SHINAWATRA DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI THAILAND TAHUN 2001-2005

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1991 hingga puncaknya pada tahun 1994. Akan tetapi, tahun 1995 bisnis ekspor yang sedang tumbuh di Thailand mengalami penurunan dan hal tersebut mengganggu para investor asing yang pada akhirnya tahun 1996 perusahaan asing menarik kembali saham-sahamnya di Thailand. Hal ini dijelaskan oleh Baker & Phongpaichit (2007, hlm. 254) yang mengemukakan:

In late 1996, foreign capital began to leak away, and international speculators began to attack the baht. The central bank contributed 500 billion baht to prop up financial institutions, and committed virtually the entire foreign reserves to protect the currency. But against the enormous funds of international speculators, these funds were puny. The government was obliged to seek the help of international monetary fund (IMF), which raised a loan of US 17.2 billion, mostly from Asian neighbours.

Tahun 1997-1998 krisis finansial terjadi di negara-negara Asia diantaranya Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan, krisis ini dimulai pada 2 Juli 1997 seiring jatuhnya nilai mata uang baht terhadap valuta asing. Pembangunan ekonomi yang lemah dan tidak seimbang juga memunculkan permasalahan baru. Bantuan yang diberikan oleh *International Monetary Fund (IMF)* masih belum cukup untuk membantu perekonomian Thailand. Bantuan juga diberikan oleh Jepang, Bank Dunia (*World Bank*), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*), dan negara tetangga. Bantuan tersebut ternyata masih belum cukup untuk menanggulangi krisis di Thailand dan utang negara semakin membesar. Krisis ekonomi berlangsung hingga 1998, Thailand menjadi negara yang dinyatakan hampir bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh.

Perdana Menteri Chuan Leekpai (1997-2001), kemudian membuat beberapa kebijakan untuk mengangkat kembali ekonomi Thailand. Usaha Chuan Leekpai ini mulai membawa ekonomi Thailand berangsur pulih. Kondisi perekonomian Thailand mengalami kemajuan dilihat dari GDP yang pada tahun 1999 berada di titik -10% meningkat menjadi 3% pada tahun 2000 (Lubis, 2010, hlm. 4). Sementara itu, krisis yang melanda Thailand mendorong salah seorang pengusaha di Thailand yakni Thaksin Shinawatra untuk membentuk sebuah partai yakni Thai Rak Thai (TRT) pada 14 Juli 1998 dan mengikuti pemilihan umum tiga tahun kedepan. Thaksin Shinawatra merupakan seorang mantan polisi, yang kemudian meniti karirnya menjadi seorang pengusaha. Thaksin kemudian

mengusung ide-ide untuk mengatasi permasalahan ekonomi Thailand yang ditimbulkan dari dampak krisis finansial 1997, gagasan tersebut kemudian ia sampaikan dalam kampanyenya untuk menarik dukungan dari rakyat Thailand. Thaksin akhirnya memenangkan pemilihan umum yang dilaksanakan bulan Januari 2001 dengan menguasai 248 dari 500 kursi (Litbang Kompas, 2006, hlm. 35).

Pada masa pemerintahannya, Thaksin berhasil membuktikan dan membawa Thailand keluar dari krisis ekonominya. Seperti dikutip dalam surat kabar Kompas “Thailand adalah salah satu negara yang mengalami krisis di Asia, yang paling cepat lulus dari program IMF, setelah Korea Selatan” (Samhadi, 2006, hlm. 36). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Thaksin Shinawatra perekonomian Thailand tumbuh dengan pesat. Dalam masa pemerintahannya angka kemiskinan turun dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Rado (2008, hlm. 22) mengungkapkan bahwa:

In 2001, when Thaksin took office as Prime Minister, the economy grew at 2.2 percent, compared to an average growth rate of ca. 8.6 percent between 1990 and 1996. The Thai economy is highly export-oriented (in 2001 exports accounted for about 57 percent of GDP) and since the crisis, most export-oriented industry is under transnational control.

Pada tahun 2001, ketika Thaksin, menjabat ekonomi meningkat sebanyak 2,2% dibanding dengan rata-rata pertumbuhan sebanyak 8,6% kenaikan di tahun 1990-1996. Kunci keberhasilan Thaksin yakni dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang kemudian dikenal dengan kebijakan *Thaksinomics*. *Thaksinomics* merupakan suatu kebijakan yang dibuat Thaksin dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian Thailand. Kebijakan yang dibuat oleh Thaksin ini diharapkan dapat memecahkan krisis ekonomi yang dialami Thailand sejak tahun 1997 untuk memperbaiki perekonomian Thailand dari tahun 2001 hingga 2005. Dalam kebijakannya Thaksin merancang program-program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Thailand.

Awal 2001 Perdana Menteri Thaksin dan wakil Perdana Menteri Somkid menyampaikan aspirasi mereka tentang sistem ekonomi Thailand yang meningkatkan permintaan internal dan memperluas wirausaha dalam negeri, serta tidak hanya bergantung pada ekspor dan investasi asing. Ambisi ini

Annisa Wiyani Putri, 2017

KEBIJAKAN PERDANA MENTERI THAKSIN SHINAWATRA DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI THAILAND TAHUN 2001-2005

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mencerminkan sikap kelompok bisnis lokal yang terpuruk pasca krisis 1997, dan mereka tidak ingin kembali merasakan ancaman usaha yang diambil alih oleh investor asing. Dalam praktiknya, prioritas *Thaksinomics* berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, dan penggunaan sistem kapitalisme dalam negeri. Kebijakan yang ditempuh dan direncanakan oleh pemerintah Thaksin terdiri dari tiga tahapan yakni kebijakan dalam negeri, kebijakan jalur ganda atau “*dual track policy*”, perencanaan pembangunan infrastruktur dan memperkuat kapitalisme (Phongpaichit, 2004, hlm. 2).

Pada Juli 2001, pemerintahan Thaksin mengumumkan kepada publik mengenai program utama dari *Thaksinomics*. Program tersebut diantaranya (Akira, 2014, hlm. 315):

1. Memberikan 1 juta baht kepada tiap desa.
2. Memberikan pinjaman tanpa bunga melalui bank pemerintah kepada masyarakat yang ingin berbisnis dan berdagang sendiri di area perkotaan dan pedesaan.
3. Memberikan bantuan kepada petani berupa pinjaman dari *Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)*.
4. One Tambon One Product (OTOP).
5. Memberikan jaminan kesehatan sebesar 30 baht setiap berobat.
6. *SMEs finance*, yakni dukungan keuangan dari pemerintah bagi UKM sebesar 157 miliar. Dalam hal ini Thaksin mengembangkan usaha menengah dan usaha kecil.
7. Proyek perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada masa pemerintahannya Thaksin Shinawatra memfokuskan pada permasalahan ekonomi Thailand. Upaya meningkatkan ekonomi tidak hanya dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan *Thaksinomics*, akan tetapi Thaksin juga fokus pada penyelesaian program dengan IMF. Disamping itu, dalam membuat kebijakan luar negeripun Thaksin fokus pada peningkatan ekonomi. Pada saat pertemuan KTT ASEAN tahun 2003, Thaksin mengusulkan untuk membentuk suatu bentuk kerjasama dengan negara perbatasan seperti Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam dan Thailand yang dinamakan *Ayeyawady – Chao Praya – Mekong Economic Cooperation Strategi (ACMECS)*. ACMECS ini

dibentuk dengan tujuan untuk memajukan perekonomian antar negara dengan mengoptimalkan potensi yang terdapat di kelima negara tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan Thaksin di bidang ekonomi berhasil mengeluarkan Thailand dari kemerosotan ekonomi yang terjadi di tahun sebelumnya, hal tersebut dapat terlihat dari meningkatnya GDP Thailand dari tahun ke tahun selama masa pemerintahan Thaksin. Pada masa pemerintahannya, rakyat juga merasa lebih sejahtera dengan program peningkatan ekonomi secara domestik, sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan ekonomi secara mandiri melalui usaha kecil.

Pemaparan di atas mengenai pemerintahan Thaksin penting untuk dikaji sebagai bahan referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui Thailand pada masa Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kajian ini dapat juga menjadi bahan pembandingan antara ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Dari penjelasan di atas memunculkan ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemerintahan pada masa Thaksin, dan keberhasilannya dalam meningkatkan perekonomian Thailand pada masa Thaksin, terutama upayanya dalam mengeluarkan Thailand dari dampak krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kebijakan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dalam upaya meningkatkan ekonomi Thailand tahun 2001-2005?”. Adapun rumusan masalah dijabarkan secara rinci dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Thailand pada saat krisis finansial Asia tahun 1997?
2. Bagaimana kondisi pemerintahan pada masa Thaksin Shinawatra tahun 2001-2005?
3. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Thaksin Shinawatra pada masa pemerintahannya?
4. Bagaimana dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Thaksin Shinawatra?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, terdapat tujuan dari penelitian ini, secara umum yakni untuk mengetahui kebijakan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dalam upaya meningkatkan ekonomi Thailand tahun 2001-2005. Secara khusus tujuannya ialah untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Kondisi Thailand pada saat krisis finansial Asia tahun 1997.
2. Pemerintahan pada masa Thaksin Shinawatra tahun 2001-2005.
3. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Thaksin Shinawatra pada masa pemerintahannya.
4. Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Thaksin Shinawatra.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara khusus yang diharapkan oleh peneliti ialah:

1. Dapat menambah khazanah mengenai sejarah salah satu negara di Asia Tenggara yakni Thailand.
2. Untuk kepentingan pendidikan dapat dijadikan bahan materi saat pembelajaran mengenai sejarah negara-negara di Asia Tenggara.
3. Dapat dijadikan sumber literatur bagi peneliti lain dalam penulisan karya ilmiah mengenai sejarah Thailand.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Thailand Tahun 2001-2005” ini tersusun menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini, peneliti akan memaparkan masalah yang akan dikaji beserta alasan peneliti memilih topik yang akan diangkat dalam penelitian. Adapun subbab yang diuraikan dalam bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini dipaparkan konsep-konsep yang mendukung penelitian yakni terkait dengan kebijakan Perdana Menteri Thaksin

Annisa Wiyani Putri, 2017

KEBIJAKAN PERDANA MENTERI THAKSIN SHINAWATRA DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI THAILAND TAHUN 2001-2005

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Shinawatra dalam upaya meningkatkan ekonomi Thailand tahun 2001-2005. Sejauh ini peneliti menggunakan konsep krisis finansial, kapitalisme, investasi, dan *Thaksinomics*.

Bab III metode penelitian, pada bab ini memaparkan tahapan-tahapan penelitian yang ditempuh untuk menyelesaikan penelitian. Dalam bab ini, dijelaskan mengenai metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode historis dengan teknik studi literatur.

Bab IV temuan dan pembahasan, pada bab IV ini peneliti akan menguraikan berbagai temuan peneliti dari hasil kajian literatur. Kemudian akan dikemukakan pula jawaban-jawaban atas rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dikemukakan dalam bab I pendahuluan.

Bab V simpulan dan rekomendasi, dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sudah dikaji dalam bab sebelumnya. Selain itu, peneliti juga akan memberi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji pembahasan yang berkesinambungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.